

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Spring merupakan salah satu gelombang revolusi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Revolusi ini merupakan aksi demonstrasi menuntut adanya perubahan sistem pemerintahan menjadi demokratis yang dilakukan oleh rakyat sipil yang terjadi pada Oktober 2011. Fenomena Arab Spring ini juga terjadi di Suriah yang disebabkan oleh ketidakpuasan akan rezim otoriter Bashar Al Assad dan melakukan penindasan terhadap masyarakat berdemonstrasi (Ford, 2019, hal. 3). Adapun respon represif yang dilakukan oleh pihak pemerintah menyebabkan banyaknya korban jiwa yang jatuh. Pemerintah merespon dengan cara-cara kekerasan seperti menurunkan tentara serta polisi-polisi untuk melakukan penangkapan terhadap aktivis dalam demonstrasi tersebut (Kamrullah & Rivai, 2019). Adanya konflik jelas merusak perdamaian, dimana karena adanya konflik menyebabkan berbagai kekerasan, baik secara langsung, struktural dan kekerasan struktural. Adanya kekerasan langsung terjadi seperti pembantaian oleh pihak pemerintah untuk menekan demonstran dengan menggunakan senjata senjata militer menyebabkan jumlah korban tewas mencapai 511.000 jiwa (Human Right Watch, 2019).

Namun, perdamaian bagi Suriah itu sendiri masih terus diupayakan. Baik negara-negara dan organisasi internasional turut untuk memperjuangkan perdamaian di Suriah. Salah satunya PBB dengan membentuk UNSMIS atau *United Nations Supervision Mission in Syria* pada tahun 2012 yang bertugas

untuk memantau penerapan gencatan senjata di Suriah, dengan mengeluarkan tiga draft resolusi pada Oktober 2011, hingga penggabungan pasukan pemeliharaan perdamaian dari PBB dan Liga Arab (Herlambang, 2015). Bukan hanya itu, bantuan dari negara lain untuk membantu perdamaian Suriah juga turut dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan intervensi kemanusiaan seperti mengirimkan pasukan militer lebih dari 400 orang untuk mengusir kelompok militan seperti ISIS di Suriah (Gordon, 2017). PBB dan Uni Eropa juga turut melaksanakan konferensi di Brussels untuk mendorong adanya perundingan damai dan memobilisasi bantuan kemanusiaan bagi Suriah (VOA Indonesia, 2018). Tiongkok juga berperan dalam menyelesaikan konflik Suriah melalui *multifaced intervention* dengan mengirimkan diplomatik khusus yang mendorong pihak-pihak bertikai untuk membentuk rancangan negosiasi serta pemberian bantuan khusus (Permadi, 2019).

Namun sayangnya, berbagai upaya ini belum mampu untuk mencapai perdamaian di Suriah. Menurut A.Muh Agil (2017), resolusi yang dikeluarkan PBB tidak terlaksana dengan efektif yang dikarenakan oleh lemahnya kemampuan mengikat dari resolusi tersebut yang bersumber dari kepentingan politik anggota. Negara lain yang turut juga didorong oleh kepentingan nasionalnya, seperti menurut Permadi (2019) menemukan bahwa Tiongkok sebagai *multifaceted intervention* didasarkan pada kepentingan geoekonomi dan geopolitiknya di Suriah, yakni untuk menjaga kestabilan rute BRI (Belt Road Initiative) di kawasan Timur Tengah agar tetap aman. (Permadi, 2019). Kepentingan terhadap konflik ini juga didukung dari penelitian Dita Arum

Kusumastuti (2017) menemukan bahwa alasan Rusia melibatkan diri dalam konflik Suriah ini disebabkan karena alasan geopolitik untuk membendung pengaruh dari Amerika Serikat di kawasan dan menjaga kepentingan militernya. Dari penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kepentingan yang bersifat material yang diperjuangkan, seperti Tiongkok akan perlunya keamanan proyek BRI dan Rusia akan alasan geopolitik dan militer. Dan sayangnya, adanya keterlibatan kedua negara tersebut tak serta merta menciptakan perdamaian atau penyelesaian konflik.

Salah satu aktor lain yang turut serta juga dalam mencapai perdamaian ini ialah Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan hadir sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional yang turut berperan pada upaya perdamaian masalah di Suriah. Sebagai salah satu negara yang dikenal memiliki dasar yang berbeda dengan negara lain, dimana pada umumnya memperoleh kekuatan dan dominasi dalam politik di dunia internasional, Tahta Suci Vatikan justru datang dengan hal yang berbeda. Sebagai negara yang dikenal dengan membawa perdamaian dan menggunakan prinsip-prinsip dasar Katolik, Tahta Suci Vatikan melakukan berbagai pendekatan yang berlandaskan kemanusiaan dan menciptakan perdamaian dan mengimplementasikan misi Gereja (Rivera A. F., 2016).

Komitmen yang dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan dalam memperjuangkan perdamaian di Suriah terlihat dari penyampaian pendapat dalam konferensi internasional, salah satunya di PBB dan melakukan negosiasi agar dilakukannya gencatan senjata di wilayah tersebut dan meminta akses ke negara tersebut agar bisa memberikan bantuan kemanusiaan, terutama di Ghoutta Timur,

yang sempat memanas (Americamagazine.org, 2018). Menurut Rivera (2016), bahwa keterlibatan dari Paus Pius XII hingga Yohannes Paulus II sudah banyak dalam menangani masalah dunia, termasuk mengatasi konflik internasional dengan prinsip-prinsip martabat manusia, solidaritas, dan kebaikan bersama dalam setiap tindakan dari Tahta Suci. Dalam penelitian Newman (2019) juga menunjukkan bahwa interaksi Gereja Katolik secara sekuler dalam hubungan internasional melalui jalur soft power yang diimplementasikan melalui advokasi atau diplomasi di PBB. Kedua penelitian tersebut merujuk pada interaksi internasional Tahta Suci Vatikan dalam konflik termasuk pendekatan teoritisnya yang menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan adalah dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik. Dalam mengejar perdamaian itu sendiri, Tahta Suci Vatikan dipengaruhi oleh beberapa ensiklik atau norma domestik, salah satunya Pacem In Terris. Adanya dokumen ini membantu Tahta Suci dalam melihat perdamaian, seperti menurut David D. Corery dan Josh King (2013) dimana Tahta Suci Vatikan melihat bahwa adanya kekuatan militer secara radikal dan tradisi perang yang adil dianggap bertentangan dengan kodrat manusia dan martabat manusia, kebenaran, keadilan dan ketulusan. Cara terbaik menyelesaikan konflik atau mencapai perdamaian itu adalah melalui pertemuan dan negosiasi, bukan dengan perang karena sangat melukai martabat dan perdamaian itu sendiri.

Dari penelitian diatas dapat dilihat bahwa aktor yang turut serta dalam penyelesaian konflik memiliki kepentingan nasional masing dan didominasi oleh negara negara yang kuat dan memang memiliki interest seperti geopolitik,

geoekonomi dan militer. Masih sangat jarang penelitian mengenai tindakan aktor terhadap konflik Suriah tanpa dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional yang bersifat realis, dan menurut penulis, kebijakan Vatikan untuk turut serta dalam konflik ini merupakan salah satu negara yang memiliki dasar dan kepentingan yang berbeda dari negara lainnya dan menarik untuk diteliti. Memang telah ada penelitian sebelumnya mengenai Vatikan terhadap krisis pengungsi Suriah ooleh Lauren A. Newman dengan menggunakan konsep soft power oleh Joseph Nye. Namun, dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada pengungsi, sedangkan penelitian ini bermaksud untuk meneliti peran dari Tahta Suci Vatikan itu sendiri menggunakan aliran norma dari konstruktivisme yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan melihat tindakan dari Tahta Suci Vatikan lebih luas. Penelitian mengenai Pacem In Terris sendiri masih sangat jarang digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan, dimana dalam penelitian sebelumnya hanya menjelaskan bagaimana posisi Vatikan memandang perang dan belum diangkat secara nyata dalam sebuah kasus.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul Pacem in Terris dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah yang bertujuan untuk membahas bagaimana norma Pacem In Terris mempengaruhi kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan terhadap konflik Suriah dalam menciptakan perdamaian di Suriah dan untuk memberikan variasi dalam melihat aktor dan kebijakan untuk memperjuangkan perdamaian dalam konflik Suriah

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan literatur review diatas, penulis kemudian merumuskan rumusan masalah yakni mengapa Tahta Suci Vatikan melibatkan diri dalam konflik Suriah, serta bagaimana pengaruh dari *Pacem In Terris* selaku norma domestik terhadap kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum : untuk mengetahui alasan Tahta Suci Vatikan turut dalam upaya perdamaian di Suriah
- b. Tujuan khusus : untuk menjelaskan mengapa Tahta Suci Vatikan turut serta dalam upaya perdamaian di Suriah dari sudut pandang konstruktivisme-norma melalui *Pacem In Terris* yang tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan.

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat akademis : Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan penelitian hubungan internasional terutama mengenai kebijakan luar negeri dengan menggunakan konsep konstruktivisme terutama menggunakan norma. Penelitian ini juga diharapkan memberikan cara pandang lain dalam melihat sebuah kebijakan luar negeri yang selama ini kerap didominasi oleh adanya unsur kepentingan nasional menurut *grand theory*. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan melengkapi penelitian sebelumnya dari perspektif yang berbeda dan juga menjadi pengembangan untuk penelitian berikutnya

b. Manfaat Praktis : Penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pemikiran tentang bagaimana norma domestik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya, khususnya mengenai Tahta Suci Vatikan yang jarang disorot.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konstruktivisme – Norma

Konstruktivisme dalam hubungan internasional memiliki pandangan bahwa hubungan internasional merupakan suatu realitas yang terkonstruksi secara sosial, yang mana memerlukan adanya interaksi antar aktor dan interaksi antar aktor ini yang kemudian membentuk kepentingan nasional suatu negara (Wendt, 1999). Konstruktivis merupakan salah satu teori yang berfokus pada proses, sehingga hal ini berimplikasi pada asumsi yang menyatakan bahwa kepentingan nasional suatu negara bukanlah sesuatu yang sudah jadi, namun mengalami proses antara aktor, baik interpretasi dan reinterpretasi pada sebuah proses interaksi (Rosyidin, 2015).

Konstruktivisme memiliki pandangan berbeda dengan teori hubungan internasional lainnya yang berpijak pada aspek material dan power seperti realis, liberalis hingga strukturalis. Konstruktivis memandang hubungan antara negara dapat dianalogikan seperti hubungan sosial masyarakat, yang memiliki kesadaran dalam bertindak yang berbeda beda, oleh karena itu, tindakan negara tidak bisa disamaratakan karena adanya faktor material tersebut. Konstruktivis memandang ada dimensi atau faktor lain dalam hubungan antarnegara, yaitu

dimensi gagasan atau dimensi yang tidak kasat mata. Konstruktivis memandang bahwa dimensi ideasional atau gagasan yang termanifestasi dalam beberapa bentuk, baik misalnya budaya, identitas, norma, bahasa, dan sebagainya dipandang lebih penting daripada dimensi material karena arti penting material itu terletak pada pemaknaannya atau penafsiran oleh masing masing aktor yang kemudian akan mempengaruhi tindakan negara tersebut (Wendt, 1999).

Dalam konstruktivis, terdapat tiga konsep yang mempengaruhi tindakan, yakni identitas, norma dan bahasa. Dari ketiga konsep tersebut, konsep yang akan digunakan adalah konsep norma. Norma merupakan salah satu konsep kunci perspektif konstruktivisme dalam hubungan antarnegara, yang menjadi pedoman negara dalam bertindak. Norma ini menjadi standar akan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Konstruktivisme memandang hubungan antarnegara seperti hubungan sosial dalam masyarakat, dimana individu tidak bisa bertindak sesuka hatinya karena terdapat batasan terhadap perilakunya yang disebut norma. Sama halnya dengan tindakan suatu negara tidak selamanya didorong oleh ambisi akan kepentingan, namun karena adanya pengaruh dari norma yang dimiliki. Konstruktivisme memandang bahwa tindakan negara tidak bersifat statis atau didikte dengan kepentingan nasional yang apa adanya (*taken for granted*). Konstruktivis memandang bahwa kepentingan nasional suatu negara merupakan derivasi dari norma yang dimiliki atau diadopsi negara tersebut (Rosyidin, 2012). Norma diartikan sebagai **harapan bersama tentang perilaku pantas yang dianut oleh kumpulan aktor** (Finnemore M. , 1996). Artinya disini, segala aktor dalam hubungan internasional, terutama negara, bertindak karena dituntun oleh

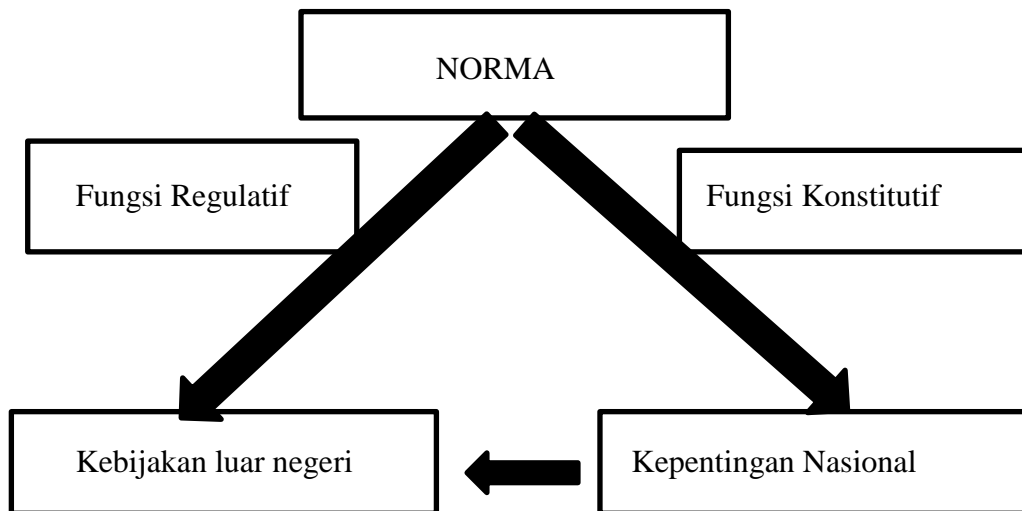
adanya aturan atau prinsip atau norma yang telah disepakati yang memandu negara bertindak dengan perilaku yang baik atau pantas (*logic of appropriateness*).

Norma sendiri dibagi menjadi dua, yakni norma domestik dan norma internasional. Sesuai dengan lingkupnya, norma domestik merupakan norma yang memiliki berlaku dalam suatu negara tertentu saja, sedangkan norma internasional berlaku dalam skala lebih dari satu negara. Norma domestik ini bisa saja berupa undang-undang, konstitusi ataupun peraturan pemerintah. Adanya norma domestik ini kemudian akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Norma yang telah dilembagakan memiliki kekuatan dalam menentukan tindakan suatu negara dan juga sebagai peta dalam kebijakan luar negerinya. Sedangkan norma internasional merupakan norma yang dibentuk dan berlaku dalam taraf internasional. Konstruktivis memandang bahwa norma bukanlah alat kepentingan suatu negara, namun menjadi landasan dalam kepentingan nasional suatu negara, yang artinya kepentingan nasional diturunkan dari norma. Norma sendiri memiliki dua fungsi, yakni sebagai fungsi regulatif dan fungsi kontitutif (Finnemore M. , 1996)

- Fungsi regulatif artinya norma berfungsi untuk mengarahkan kebijakan luar negeri atau tindakan suatu negara, yang menyediakan panduan mengenai bagaimana negara harus bertindak, apa yang harus dan tidak dilakukan. Norma dalam hal ini berfungsi sebagai peta bagi suatu negara untuk bertindak.

- Sebagai fungsi konstitutif, norma berperan dalam pembentukan kepentingan aktor (kepentingan nasional suatu negara). Sehingga, selain sebagai pemandu dalam kebijakan luar negerinya, norma juga berfungsi sebagai pembentuk kepentingan suatu negara. Konstruktivis memandang bahwa negara tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya, namun dengan adanya norma kemudian menentukan mana yang baik dan buruk, yang kemudian membentuk kepentingan negara serta kepentingan ini kemudian mendasari tindakan negara yang pada akhirnya kepada norma tersebut, apakah norma tersebut dipertahankan atau diubah.

Gambar 1.1 Fungsi ganda norma



Sumber : Finnemore (1996)

Dengan menggunakan konsep norma dari konstruktivis yang menurut penelitian dari Finnemore di atas dan masih minimnya penelitian mengenai Tahta Suci Vatikan dari kacamata konstruktivisme, maka penelitian inilah yang kemudian mengisi kekosongan/menjadi *state of the art*/kebaruan dari penelitian mengenai kebijakan luar negeri suatu negara dengan paradigma yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan fungsi dari norma sebagai konsep yang kemudian menjelaskan mengenai kebijakan dari Tahta Suci Vatikan terhadap konflik Suriah.

1.5.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan cerminan kepentingan sebuah negara. Adanya kebijakan luar negeri menunjukkan kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui interaksi terhadap aktor lain dalam hubungan internasional, dimana kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau keputusan otoritatif yang dilakukan oleh pemerintah (Rosenau, 1980). Adanya kebijakan suatu negara dapat berbeda beda, tergantung pada bagaimana kondisi atau situasi internasional yang sedang terjadi. Kebijakan luar negeri secara garis besar didasarkan pada lingkungan eksternal dan lingkungan internal suatu negara. Kebijakan luar negeri juga dikatakan sebagai bentuk adaptasi negara dengan lingkungan, sehingga negara perlu untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuannya, baik untuk bertahan hidup atau untuk menyeimbangkan dengan tekanan internal atau eksternal (Rosenau J. , 1981). Sebagai regulatif artinya untuk mengarahkan

kebijakan luar negeri suatu negara dan sebagai konstitutif untuk menjadi landasan pembentukan kepentingan suatu negara.

Menurut Howard H. Lentner, kebijakan luar negeri merupakan sebuah aksi yang meliputi tiga hal, yakni *selection of objectives* atau menentukan tujuan yang akan dicapai, kemudian *mobilization of means* atau mobilisasi sarana atau pengerahan sumber daya yang dimiliki suatu negara dan kemudian *implementation* atau untuk mencapai tujuan melalui beberapa tindakan (Lentner, 1974). Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh banyak hal, namun secara umum dipengaruhi oleh domestik dan lingkungan internasional, termasuk salah satunya norma, baik norma domestik atau internasional. Norma dianggap penting karena berfungsi untuk membimbing perilaku dengan memberikan motivasi untuk bertindak. Norma membantu menentukan tujuan negara dan dapat dilihat sebagai peta jalan bagi tindakan kebijakan luar negeri negara (Falk, 1971).

Selain itu, nilai dan norma moral dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pengembangan dan implementasi kebijakan luar negeri serta menetapkan batas-batas pertimbangan serta pelaksanaan kebijakan luar negeri sehingga setiap negara menganggap dirinya dibatasi oleh prinsip, norma, dan aturan yang menentukan dan melarang perilaku-perilaku tertentu (Puchala & Hopkins, 1982). Norma membentuk kesadaran aktor dan penerimaan metode dan teknologi yang diandalkan untuk mencapai tujuan mereka (Kowert & Legro, 1996). Batasan normatif dapat menyebabkan aktor menolak cara tertentu sebagai cara yang tidak tepat untuk mencapai tujuan kebijakan mereka. Norma tidak hanya akan memengaruhi pengadopsian cara atau sarana oleh negara, tetapi juga identitas

mereka menentukan cara mana yang dapat diterima. Misalnya, menurut Price dan Tannenwald (1996), negara-negara tertentu tidak dapat menggunakan alat-alat seperti senjata nuklir atau kimia, karena identitas mereka melarang penggunaan senjata-senjata tersebut.

Implementasi kebijakan luar negeri ini bermacam macam jenisnya. Beberapa jenis kebijakan luar negeri antara lain diplomasi, propaganda, ekonomi, dan militer (Holsti, 1977).

1. Diplomasi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang sering digunakan untuk mengimplementasikan keputusan yang telah ditentukan (Baylis & Smith, 2005). Diplomasi digunakan sebagai sarana komunikasi negara dalam meraih kepentingannya. Diplomasi merupakan sebuah keadaan dimana aktor saling bernegosiasi dan tawar menawar dalam sebuah isu untuk meraih kepentingannya.
2. Propaganda merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi opini atau perilaku negara atau aktor lainnya agar sesuai dengan kepentingan atau tujuan negara tersebut. Dalam hal ini negara tersebut berupaya untuk memengaruhi kelompok lain atau masyarakat tertentu dengan tujuan agar kelompok yang dipengaruhi dapat mempengaruhi kebijakan negara sasaran.
3. Ekonomi merupakan instrumen kebijakan luar negeri baik sebagai imbalan atau bahkan paksaan. Instrumen ekonomi ini

bertujuan untuk memaksa negara sasaran untuk melakukan hal yang sesuai dengan kepentingan dari negara yang melakukan ancaman. Instrumen ini biasanya seperti embargo ataupun memberikan balasan untuk negara yang dituju. Sedangkan sebagai imbalan, instrumen ekonomi digunakan sebagai apresiasi atau balasan dari tindakan yang dilakukan negara sasaran yang sesuai dengan kepentingan negara memberikan imbalan.

4. Militer merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang bersifat dukungan ataupun ancaman untuk memperoleh tujuan yang diinginkan misalnya menggunakan senjata militer atau hal lain yang berhubungan langsung dengan militer.

Selain empat hal diatas, ada bentuk lain dari kebijakan luar negeri, yakni bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri dipandang skeptis oleh kaum realis, dimana menganggap bantuan diberikan karena ada kepentingan yang terpaut dibelakangnya. Kepentingan yang dimaksud seperti kepentingan material, seperti ekonomi, politik atau militer. Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai salah satu strategi atau kebijakan luar negeri untuk meraih kepentingannya dengan hubungannya terhadap aktor atau entitas lain (Syinder, Bruck, & Sapin, 1954) (Syinder, et.all, 1954). Bantuan ini memiliki berbagai bentuk, baik secara ekonomi seperti pemberian uang, barang dan jasa, atau bantuan pangan hingga bantuan secara militer. Bantuan ini dapat didorong oleh beberapa hal, baik karena alasan kemanusiaan atau karena motif ekonomi hingga karena alasan sosial politik

(Andersson, 2009). Bantuan luar negeri dalam tulisan ini menggunakan kacamata dari konstruktivis, yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri didorong oleh alasan kemanusiaan, yang melihat bahwa sudah sesuatu yang pantas bagi negara negara untuk saling membantu, terutama pada korban konflik dan juga masyarakat miskin. Adanya nilai dan ide kemanusiaan sebagai sebuah norma domestik dan internasional mendorong negara negara untuk memberikan bantuan luar negeri. Adanya perspektif altruism sebagai ide dari konstruktivisme menekankan negara negara untuk membantu negara lain sebagai kewajiban moral.

1.5.3 Perdamaian

Perdamaian sendiri memiliki beragam pengertian sehingga sulit untuk didefinisikan. Namun menurut Galtung (2007), perdamaian itu bisa dipahami ketika keadaan sedang tidak damai. Artinya, perdamaian baru terlihat penting ketika terjadi konflik atau perang (*we often recognize it by its absence*). Karena perang dipahami dengan tidak adanya perdamaian, sehingga perdamaian merupakan ketiadaan peperangan, ketiadaan kekerasan, kelaparan dan ketiadaan kesulitan. Ketiadaan kekerasan ini juga menentukan definisi dari perdamaian itu sendiri yang dibagi menjadi 2, yakni perdamaian positif dan negatif. Perdamaian negatif identik dengan ketiadaan kekerasan langsung yakni perang, sedangkan perdamaian positif identik dengan ketiadaan segala kekerasan. Dalam melihat perdamaian yang menyeluruh, pertama tama Galtung (1992) membagi kebutuhan

manusia menjadi empat kategori dasar, yakni keberlangsungan hidup (*survival*), kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*), kebebasan (*freedom*) dan identitas (*identity*). Adapun keempat aspek ini terancam oleh empat bentuk kekerasan yakni kekerasan langsung (menyakiti dan membunuh manusia dengan senjata), kekerasan struktural I (kematian akibat kelaparan, penderitaan dan penyakit yang seharusnya bisa dicegah karena struktur masyarakat yang tidak adil), kekerasan struktural II (perampasan hak bebas memilih dan partisipasi yang memengaruhi kehidupan masyarakat sendiri) hingga kekerasan kultural (justifikasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural melalui nasionalisme, rasisme, seksisme dan bentuk diskriminasi atau prasangka lainnya).

Untuk mencapai perdamaian sendiri, Galtung (1992) membagi 8 komponen yang menunjukkan perdamaian yang komprehensif. Adapun komponen tersebut dibagi menjadi dua bagian, empat aspek pada perdamaian negatif dan empat aspek pada perdamaian positif. Perdamaian yang komprehensif merupakan keadaan dimana tidak adanya keempat bentuk kekerasan (perdamaian negatif) dan keadaan dimana terdapat kegiatan untuk meredakan masa lalu atau saat ini untuk mencegah adanya kekerasan di masa depan (perdamaian positif). Adapun ke delapan aspek tersebut akan digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Delapan komponen perdamaian

Kebutuhan dasar	Perdamaian Negatif	Perdamaian Positif
Kelangsungan hidup (<i>survival</i>): ketiadaan kekerasan langsung oleh militer	Tidak adanya kekerasan langsung yang dapat dicapai dengan senjata, senjata, pencegahan	Kerjasama yang meningkatkan kehidupan dan mencegah terjadinya kekerasan langsung yang dapat dilakukan melalui rekonstruksi, rekonsiliasi,

	terorisme dan transformasi konflik, hingga terorisme negara dan pembangunan perdamaian cara cara yang nir atau peace building kekerasan
Pembangunan (development) yakni penghapusan kekerasan struktural I karena masalah ekonomi	Dilakukan dengan Pembangunan ekonomi memberikan berbagai tingkat lokal, nasional dan bantuan, seperti global dimana setiap orang bantuan pangan atau dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya kemanusiaan, pengentasan kemiskinan dan kesengsaraan
Kebebasan (freedom) yakni ketiadaan kekerasan struktural II yang disebabkan oleh politik	Pembebasan dari Tata kelola dan adanya semua penindasan, partisipasi yang baik, HAM, okupasi dan dan hak untuk menentukan keditakoran nasib sendiri
Kultur damai (identitas)	Absennya kekerasan kultural yang Mempromosikan budaya dikarenakan budaya, damai, adanya komunikasi mengatasi prasangka dan dialog global, mengembangkan budaya dan akibat identitas seperti struktur yang damai, meningkatkan pendidikan dan kebangsaan, ras, jurnalisme perdamaian agama, jenis kelamin, dll; menghentikan justifikasi perang dan kekerasan di berbagai media.

Sumber : (Webel & Galtung, 2007)

Dalam mencapai perdamaian yang kompleks tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tindakan atau upaya, termasuk salah satunya terhadap negara yang sedang mengalami konflik. Beberapa negara yang terdorong dalam penciptaan perdamaian ini memiliki beragam motif dan alasan, namun dalam

penelitian ini konsep norma dari konstruktivis akan digunakan sebagai penjabar keterlibatan Tahta Suci Vatikan terhadap konflik Suriah. Adanya norma *Pacem in Terris* atau perdamaian dunia memiliki fungsi yang berdampak pada kebijakan luar negeri Tahta Suci. Keterlibatan tersebut terwujud melalui beberapa bentuk kebijakan luar negeri, baik diplomasi, propaganda hingga bantuan luar negeri. Adanya usaha untuk menciptakan perdamaian di Suriah juga tidak hanya dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan, namun oleh aktor internasional lainnya yang didorong atau dipengaruhi oleh norma yang diusung oleh Tahta Suci Vatikan. Adapun berbagai upaya tersebut dilakukan yang didorong oleh norma perdamaian yang diusung oleh Tahta Suci Vatikan dalam mencapai perdamaian di Suriah baik negatif atau positif.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Konstruktivisme – Norma

Norma dipahami sebagai kerangka yang mengatur tindakan negara yang berisi mengenai tindakan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996). Hal ini menunjukkan norma sebagai standar tindakan negara yang berisi anjuran dan larangan dalam merespons suatu fenomena. Karena norma mengacu pada standar perilaku yang baik dan pantas, maka konstruktivis memandang norma akan mendorong negara negara untuk bertindak dengan logika kepantasan (*logic of appropriateness*). Norma juga diartikan sebagai pemahaman kolektif yang membuat klaim perilaku pada aktor yang dikarenakan oleh identitasnya, dimana norma ini yang akan menentukan

perilaku yang sesuai dengan identitas tertentu dan mencerminkan pola perilaku dan menimbulkan harapan tentang apa sebenarnya yang akan dilakukan dalam situasi tertentu (Flockhart, 2016). Sehingga dapat disimpulkan bahwa norma merupakan aturan, standar, atau prinsip yang merupakan resep tindakan dalam situasi tertentu dan sebagai rasa kewajiban yang harus diikuti (Hurrel, 2002).

Norma sendiri dibagi menjadi dua, yakni norma domestik dan norma internasional. Kedua jenis norma ini memiliki legitimasi masing masing, dimana norma domestik hanya akan berlaku pada domestik atau negara tertentu saja, sedangkan norma internasional akan berlaku bagi negara negara yang menganutnya. Adanya norma inilah yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara atau kepentingan suatu negara, yang disebut juga sebagai fungsi regulatif dan konstitutif.

Dalam operasonalisasi konsep penelitian ini, beberapa indikator akan digunakan ialah fungsi konstitutif dan regulatif dari norma *Pacem in Terris*. Norma *Pacem In Terris* atau disebut sebagai norma Perdamaian Dunia akan digunakan untuk melihat fungsinya sebagai norma domestik dari Tahta Suci Vatikan dalam menjellaskan kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan. Norma perdamaian dunia ini yang kemudian sebagai ‘peta’ kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan mengenai bagaimana kebijakan yang harus dilakukan dan sesuai dengan norma itu sendiri (fungsi regulatif) dan sebagai kepentingan Tahta Suci Vatikan untuk memperjuangkan perdamaian (fungsi konstitutiff).

1.6.2. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai instrumen atau cara yang digunakan oleh suatu negara memperoleh tujuannya atau kepentingannya melalui berbagai strategi atau pendekatan dan dalam hubungannya dengan entitas eksternal termasuk dengan keputusan untuk tidak melakukan apa apa. Hal ini bukan menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin karena dengan tidak melakukan apa apa juga sebagai cara yang digunakan untuk menghindari masalah atau hal lain yang mungkin bertentangan atau sesuai dengan keadaan domestiknya (Hudson, 2016).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri ialah kondisi domestik negara tersebut. Bagaimana bentuk pemerintahannya, pemimpinnya, keadaan ekonomi dan politik hingga nilai atau norma yang dianut, karena sebuah kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari kondisi domestik suatu negara. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, norma memiliki dua peran inti terkait perilaku aktor, dimana norma berperan untuk mengatur perilaku melalui penetapan standar perilaku atau harapan kolektif dan membangun identitas dan kepentingan, baik identitas negara/kolektif melalui tindakan dan dipersepsikan oleh masyarakat internasional (Tabak, 2016). Oleh karena itu, dalam kebijakan luar negeri, terjemahan dari suatu norma menjadi tindakan menunjukkan bahwa pemerintah akan bertindak berdasarkan identitasnya dan pada harapan kolektif yang melekat dalam norma itu sendiri (Finnemore M. , 1996).

Implementasi kebijakan luar negeri juga memiliki berbagai bentuk, yakni seperti diplomasi, propaganda, ekonomi, dan militer hingga bantuan luar negeri. Adapun bentuk kebijakan luar negeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah

diplomasi, propaganda dan bantuan luar negeri. Penelitian ini akan menggunakan bentuk-bentuk tersebut dalam melihat kebijakan luar negeri yang Tahta Suci Vatikan gunakan untuk mencapai kepentingan ataupun tujuan nasionalnya.

1.6.3 Perdamaian

Perdamaian merupakan hal yang kompleks, tidak hanya sekedar ketiadaan konflik karena konflik merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Perdamaian juga bukan sekedar ketidadaan perang dan kekerasan karena perdamaian juga memiliki atribut positif. Seperti menurut Howard dalam David Cortright (2008) menyatakan bahwa perdamaian bukan hanya sekedar absennya perang, namun juga pemeliharaan sebuah masyarakat yang tertib dan adil. Adanya pandangan ini juga diamini oleh Galtung (1964) yang kemudian membagi damai itu menjadi dua keadaan, yakni perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merupakan tidak adanya kekerasan langsung seperti perang dan perdamaian positif merupakan keadaan dimana absennya segala kekerasan dan keadaan. Perdamaian positif juga diartikan sebagai kerjasama dan integrasi masyarakat dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan melampaui kondisi yang membatasi potensi manusia dan memastikan peluang dalam realisasi diri (Ercoşkun, 2020). Dari kondisi damai tersebutlah, Galtung membagi kekerasan menjadi tiga bentuk yakni kekerasan langsung, struktural dan kultural. Dalam mencapai perdamaian tersebut juga, Galtung membaginya dalam beberapa cara, khususnya berdasarkan kebutuhan dasar dan tergantung perdamaian itu sendiri, baik negatif atau positif.

Dalam operasionalnya, penulis akan menggunakan jenis jenis kekerasan tersebut menjelaskan kekerasan yang terjadi di konflik Suriah, dan beberapa indikator mencapai perdamaian melalui kedelapan komponen dari Galtung khususnya dalam mencapai perdamaian negatif dan positif di Suriah.

1.7 Argumen Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya *Pacem In Terris* sebagai norma domestik sebagai sumber determinan yang membentuk kepentingan Tahta Suci Vatikan untuk memperjuangkan perdamaian dan hak asasi manusia. Adanya kepentingan akan perjuangan akan perdamaian di dunia mendorong kebijakan Tahta Suci Vatikan untuk turut serta dalam konflik Suriah yang berkepanjangan melalui beberapa bentuk bentuk kebijakan luar negeri seperti diplomasi, propaganda dan bantuan luar negeri. Norma yang disalurkan melalui beberapa saluran perdamaian sekaligus dalam kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan digunakan untuk mencapai perdamaian negatif seperti melalui seruan untuk gencatan senjata, pencegahan terorisme, pemberian bantuan kemanusiaan, menyerukan penghentian konflik melalui berbagai dialog damai.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif eksplanatif. Penelitian ini berusaha memberkan penjelasan atau argumentasi terhadap alasan terjadinya suatu fenomena yang terkait dengan penelitian ini. Argumentasi didasarkan pada kerangka teori yang relevan untuk menjelaskan

fenomena dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan adanya hubungan atau pengaruh akan sebuah variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian juga dimaksudkan bukan hanya menggambarkan bagaimana terjadinya suatu fenomena, namun juga untuk menjelaskan mengapa terjadinya sebuah fenomena dan bagaimana pengaruhnya. Dan dalam penelitian ini, dibutuhkan hipotesis sebagai argumen awal yang kemudian peneliti menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel dalam sebuah hipotesis (Bungin, 2011) Untuk memperkuat argumentasi, data data yang relevan juga akan dipaparkan dalam penelitian ini.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis adalah Tahta Suci Vatikan

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data berupa kata kata, teks atau verbal.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis merupakan sumber yang sekunder dimana penulis peroleh melalui media perantara seperti dari buku, website resmi, penelitian terdahulu, jurnal internasional, berita, media massa melalui internet hingga laporan atau ke perpustakaan langsung.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan teknik secara *desk research*, dimana penulis akan mengumpulkan data melalui jurnal-jurnal,

situs surat kabar, penelitian terdahulu, dokumen instansi hingga laporan resmi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data mengenai kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Suriah mulai tahun 2012 hingga tahun 2021. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data data mengenai *Pacem In Terris* dan data data lain yang mendukung hipotesis.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam teknik menganalisis data, penullis akan menggunakan metode kongruen. Kongruensi dipandang sebagai kondisi yang secara luas, yakni sesuai dengan sesuatu atau sesuai dengan dasarnya (Eckstein, 1997). Ketika ingin melakukan analisis dengan kongruensi, maka peneliti akan dihadapkan kepada dua pertanyaan awal, yakni mengenai teori apa yang akan dipilih atau terapkan dan kasus mana yang harus dipilih dan diselidiki (Blatter & Haverland, 2012). Penggunaan teori ini yang kemudian sebagai *independen variable* untuk memilih data-data yang telah dikumpulkan.

Dalam analisis ini, jenis informasi atau data yang dibutuhkan digambarkan dengan hipotesis atau asumsi yang disimpulkan dari teori yang telah dipilih dan ditentukan karena metode kongruen adalah metode dimana peneliti yang merumuskan atau mereproduksi teori dan memprediksi hasil dari keadaan akan kasus tertentu. Jika hasil kasus konsisten atau sesuai dengan prediksi teori, ada kemungkinan terdapat hubungan kausal antara keadaan dan fenomena sosial (George & Bennett, 2005). Atau dapat dikatakan metode kongruen *berfokus pada logika sebab akibat* yang terkandung dalam sebuah premis teori (*theory driven*).

Kemudian data tersebut disajikan untuk melihat kausalitas antara independen dan dependen variabel (mengikuti pola *cause and effect*), dimana untuk melihat hubungan sebab akibat norma dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Tujuan dari penggunaan metode ini ialah untuk memperkuat posisi teori atau paradigma dibandingkan dengan paradigma lain atau untuk menyempurnakan teori-teori tertentu dalam sebuah program penelitian (Blatter J. , 2012). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivis aliran norma sebagai variabel independen dan sebagai filter data terhadap kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan di tahun 2012-2021. Dengan filter tersebut, penulis mampu menentukan kebijakan mana yang sesuai dengan asumsi dari konstruktivisme aliran norma dan menunjukkan pola *cause and effect*.